



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

RANCANGAN RENCANA KERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN

2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Jl. Imam Bonjol, Desa No. 50 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan,
Kabupaten Kepulauan Anambas



KATA PENGANTAR

Bidang kependudukan merupakan salah satu hal pokok dan penting dalam kerangka dimensi pembangunan, karena segala aspek perencanaan pembangunan berpangkal dari dan untuk penduduk. Adalah tidak mungkin dapat tersusun suatu perencanaan pembangunan yang baik, apabila manajemen kependudukan tidak dikelola secara baik dan benar.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang matang, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Program/Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, Alhamdulillah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Tarempa, Maret 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



HERYANA, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19741130 200212 2 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	13
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	16
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	22
3.3 Program dan Kegiatan	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	30
BAB V PENUTUP	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan ditingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-undang dan guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar Program-program dan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan penyusunan dokumen perencanaan unit kerja, yaitu Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Renja PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas berpedoman kepada Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor B/000.7.2.4/50/BAPPEDA/SD/2/2024 tanggal 29 Februari 2024 Hal Permintaan Dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu urusan wajib daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban kepada Warga Negara perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah



- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 16. Kepmendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Nasional;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2015;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas



- Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
 22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 480);
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimaksudkan untuk menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2025;

1.3.2 Tujuan

- 1 Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025;
- 2 Mengukur kinerja pelayanan bidang Administrasi Kependudukan;
- 3 Menjaga kesinambungan antara RPJMD , Renstra dan Renja untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 4 Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas disusun dengan sistematika sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Renja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Rancangan Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Rancangan Renja, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menguraikan tentang rencana Program dan Kegiatan serta Rencana Kerja dan Anggaran Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana direncanakan pada dokumen Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas TA 2023, berdasarkan DPPA PD Tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program dan 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan Presentase Realisasi sebesar 96,24 % dengan presentase indikator capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Jumlah Anggaran Rp. 7.200.000
 - Jumlah Realisasi Rp 7.200.000
 - Realisasi Keuangan (%) = 100 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 5.651.984.268
 - Jumlah Realisasi Rp 5.507.881.975
 - Realisasi Keuangan (%) = 97,45 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 961.543.479
 - Jumlah Realisasi Rp. 864.313.067
 - Realisasi Keuangan (%) = 89,89%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%



4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 91.666.542
 - Jumlah Realisasi Rp. 86.727.080
 - Realisasi Keuangan (%) = 94,61%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 2.405.952.874
 - Jumlah Realisasi Rp. 2.324.029.616
 - Realisasi Keuangan (%) = 96,59%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Jumlah Anggaran Rp. 43.280.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 34.870.000
 - Realisasi Keuangan (%) = 80,57%
 - Realisasi Fisik (%) = 100%
- II. Program Pendaftaran Penduduk.
1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - Jumlah Anggaran Rp. 269.109.076
 - Jumlah Realisasi Rp. 266.018.890
 - Realisasi Keuangan (%) = 98,85 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100
 2. Penataan Pendaftaran Penduduk:
 - Jumlah Anggaran Rp. 48.666.220
 - Jumlah Realisasi Rp. 48.666.220
 - Realisasi Keuangan (%) = 100 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100
 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk:
 - Jumlah Anggaran Rp. 115.593.920
 - Jumlah Realisasi Rp. 99.587.320
 - Realisasi Keuangan (%) = 86,15 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100
- III. Program Pencatatan Sipil.
1. Pelayanan Pencatatan Sipil :
 - Jumlah Anggaran Rp. 158.310.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 153.056.980



- Realisasi Keuangan (%) = 96,68 %
- Realisasi Fisik (%) = 100

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :
 - Jumlah Anggaran Rp. 215.212.500
 - Jumlah Realisasi Rp. 200.753.100
 - Realisasi Keuangan (%) = 100 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100

V. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

1. Penyusunan Profil Kependudukan :
 - Jumlah Anggaran Rp. 47.681.000
 - Jumlah Realisasi Rp. 46.259.600
 - Realisasi Keuangan (%) = 97,02 %
 - Realisasi Fisik (%) = 100

Selanjutnya untuk Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 5 (lima) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan yang terakomodir pada DPA Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan prakiraan capaian kinerjanya, dimana capaian kinerja tahun 2023 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2024 tersebut dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan tahun 2025.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM;
2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan;
3. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
4. Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

Mengacu pada Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan sebuah instrumen untuk memperkecil



kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, sebagai upaya untuk mengarusutamakan gender dalam pembangunan demi mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan masyarakat. Beberapa regulasi telah diterbitkan, mengamanatkan pemerintah di semua level untuk mengimplementasikannya, termasuk di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Permasalahan yang sering mengemuka dalam pelaksanaan PUG adalah kebijakan pembangunan yang diambil seringkali hanya memperhatikan tugas dan fungsi instansi serta prioritas pembangunan, belum memperhatikan sasaran kelompok yang terlibat dan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran tertentu (netral gender). Berangkat dari hal tersebut diatas, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas telah mengakomodir satu Program dan dan dua Kegiatan untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) yaitu pada Program Pendaftaran Penduduk pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (dengan output dokumen KIA/Kartu Identitas Anak), dimana dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan, pelayanan dilakukan sama dan setara baik kepada anak berjenis kelamin laki-laki ataupun kepada anak berjenis kelamin perempuan untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), demikian juga pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan tidak terdapat perbedaan bentuk pelayanan baik kepada pemohon laki-laki ataupun kepada pemohon perempuan, semua diperlakukan sama, dan dapat disampaikan bahwa isu gender kiranya lebih terlihat pada pelayanan akte kelahiran pada Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting dimana pemohon yang secara administrasi tidak dapat melampirkan buku nikah/akte perkawinan sebagai syarat penerbitan akte kelahiran maka dokumen akan tetap diproses dengan pencatatan sebagai anak ibu. Kiranya 3 (tiga) Sub Kegiatan diatas menjadi Sub Kegiatan yang responsif gender dan berkontribusi terhadap peningkatan



implementasi pengarusutamaan gender pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan pelayanan publik pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tercermin dari tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan. SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada program Nasional sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yaitu tercantum dalam *Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas*

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Tahun 2020	Target						Capaian		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Hasil SKM	78,67/B	82/B	88,31/A	88,32/A	88,33/A	88,34/A	88,34/A	88,17/B	88,17/B	85,80/B
2	Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	53,33%	60%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	58,63/CC	61/B	63/B	67/B	72/B	75/BB	75/BB	60,93%	61,37%	-
4	Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	73,55/BB	73,85/BB	74,00/BB	74,50/BB	80,00/BB	80,10/BB	80,10/A	74,02%	60,91%	69,61%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan kepada OPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya guna pencapaian visi misi Kepala Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis. Baik berupa keadaan, kondisi, ataupun peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Meskipun pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target renstra periode yang lalu hasilnya cukup baik pada tahun lalu, namun berdasarkan evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya pada kinerja pelayanan administrasi kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Masih tingginya jumlah pemegang Kartu Keluarga Lama.

Masih banyak sekali penduduk yang tidak melakukan *update* data Kartu Keluarganya. Sebagian masyarakat cenderung mengurus Kartu Keluarga pada saat ada permasalahan ataupun kepentingan mendesak seperti menikah, sakit dan sebagainya, sebagian masyarakat kurang menyadari pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang akurat dan valid, karena selain untuk kepentingan pribadi juga untuk validitas data kependudukan daerah dan nasional.

2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki akte kelahiran.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum mengurus atau memiliki akte kelahiran yang disebabkan oleh beberapa faktor.

3. Sulitnya akses transportasi menuju Pusat Pemerintahan.

Sebagaimana diketahui, bahwa wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari pulau-pulau yang terhubung oleh lautan,

dengan pelayanan terpusat di Ibu Kota Pemerintahan yang posisinya jauh dari beberapa kecamatan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap menurunnya semangat masyarakat untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan yang belum dimiliki. Untuk mengeliminasi permasalahan tersebut, sejak tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan pelayanan dengan cara jemput bola, dengan prioritas ke desa-desa yang lokasinya sangat jauh. Hal ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya jumlah warga yang mengajukan permohonan dokumen kependudukan.

Dengan cukup tingginya pencapaian kinerja program tersebut, kiranya perlu untuk direncanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

4. Kurangnya kualitas data kependudukan.

Selama ini fakta yang terjadi di masyarakat adalah :

- Data penduduk yang digunakan pada saat pemilu atau pilkada masih belum valid padahal sumber datanya dari *Data Base* Kependudukan di Ditjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementarian Dalam Negeri RI;
- Data penduduk dari Disdukcapil selalu berbeda dengan data penduduk dari BPS.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas akan memperhatikan pembangunan yang bersifat lintas sektor seperti implementasi Kabupaten layak anak yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak-hak anak sebagai langkah awal untuk memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak dan penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat memperhatikan suatu Kabupaten yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kondisi gagalnya pertumbuhan tubuh dan otak pada anak akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir yang disebut dengan *stunting*, dalam hal ini pemerintah di Kabupaten Anambas memperhatikan perencanaan dalam

pengecahan stunting dengan prevalensi stunting tahun 2021 sebesar 15,8% menurun menjadi 6,48% pada tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dukungan pemerintah daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas terkait *Grand Desain* Pembangunan Kependudukan yaitu dalam mengambil kebijakan perencanaan program dan anggaran sebagai upaya mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial dan mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dengan perencanaan pembangunan inovatif yang bersifat holistic-tematik, integratif dan spasial untuk diintegrasikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Organisasi Perangkat Daerah wajib untuk mengembangkan kreatifitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas membuat suatu inovasi pelayanan masyarakat dengan tujuan mempermudah kepengurusan dokumen kependudukan masyarakat yaitu inovasi Pulau Pahat (Penjemputan Langsung Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat dan Tepat di Anambas). Inovasi Pulau Pahat Anambas merupakan inovasi pelayanan penjemputan langsung dan mengantarkan dokumen kependudukan ke alamat dilakukan untuk memberikan pelayanan efektif dan efisien bagi masyarakat bertempat tinggal di pulau - pulau. Inovasi ini berdampak kepada masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dan penduduk rentan administrasi kependudukan yang tidak bisa datang ke Disdukcapil melakukan pengurusan dokumen kependudukan, seperti Lansia, disabilitas, Orang Dengan Gangguan Jiwa, sakit menahun dan lain-lain.

Agenda kegiatan tahun 2025 akan berupaya lebih optimal pada pelaksanaan inovasi daerah, mengingat pada tahun 2023 Kab. Kep. Anambas memiliki banyak potensi inovasi daerah yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan hasil dari rilis Kementerian Dalam Negeri bahwa Kab. Kep. Anambas dikategorikan sebagai daerah yang inovatif. Optimalisasi terhadap implementasi inovasi daerah menjadi konsen bagi berbagai pihak di Kab. Kep. Anambas.

Pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan upaya dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai strategi untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol, serta memperoleh manfaat yang sama terhadap perencanaan pembangunan daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kab. Kep. Anambas tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan, dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Disdukcapil. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan RKPD

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Renja Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Analisis Kebutuhan Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.378.992.866	APBD	-		9.378.992.866
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	8.200.000	APBD	-	100%	8.200.000
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000
2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	6.072.139.108	APBD	-	100%	6.072.139.108
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	5.928.479.108	APBD	-	100%	5.928.479.108
4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000
5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	100%	139.560.000	APBD	-	100%	139.560.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinas	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas		100%	887.339.530	APBD	-	100%	887.339.530
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	Disdukcapil KKA	5 Jenis	10.000.000	APBD	-	12 Bulan	10.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

		Kantor	bangunan kantor yang disediakan							
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	400.000.000	APBD	-	12 Bulan	400.000.000
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapil KKA	10 Jenis	12.998.922	APBD	-	10 Jenis	12.998.922
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	3 Jenis	19.801.000	APBD	-	3 Jenis	19.801.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	29.582.608	APBD	-	5 Jenis	29.582.608
12	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Disdukcapil KKA	25 Eksemplar	5.000.000	APBD	-	25 Eksemplar	5.000.000
13	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	5 Kali	12.375.000	APBD	-	5 Kali	12.375.000
14	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapil KKA	100 Kali	397.582.000	APBD	-	100 Kali	397.582.000
5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	2.000.000	APBD	-	100%	2.000.000
15	2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil KKA	3 Unit	1.000.000	APBD	-	3 Unit	1.000.000
16	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Disdukcapil KKA	2 Jenis	1.000.000	APBD	-	2 Jenis	1.000.000
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		100%	2.320.504.228	APBD	-		2.320.504.228
17	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	90.704.460	APBD	-	33 Jenis	90.704.460
18	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	170.000.000	APBD	-	100%	170.000.000
19	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	2.059.799.768	APBD	-	100%	2.059.799.768
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik		100%	87.810.000	APBD	-	100%	87.810.000
20	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	15.000.000	APBD	-	100%	15.000.000
21	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	12.810.000	APBD	-	100%	12.810.000
22	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	60.000.000	APBD	-	100%	60.000.000
II	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				557.328.550	APBD	-		557.328.550
8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	505.809.650	APBD	-		505.809.650
23	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Disdukcapil KKA	2 Dokumen	1.000.000	APBD	-	2 Dokumen	1.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

			Kependudukan							
24	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	125.775.400	APBD	-	100%	125.775.400
25	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	188.671.205	APBD	-	1000 Dokumen	188.671.205
26	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	181.300.000	APBD	-	3500 Dokumen	181.300.000
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	50.518.900	APBD	-		50.518.900
27	2.12.02.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	50.518.900	APBD	-	100%	50.518.900
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	1.000.000	APBD	-		1.000.000
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Disdukcapil KKA	120 Orang	1.000.000	APBD	-	120 Orang	1.000.000
III	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				236.000.000	APBD	-		236.000.000
11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		100%	236.000.000	APBD	-		236.000.000
29	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	235.000.000	APBD	-	1000 Dokumen	235.000.000
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
IV	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				301.687.000	APBD	-		301.687.000
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				300.687.000	APBD	-		300.687.000
31	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	180.687.000	APBD	-	5 OPD	180.687.000
32	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	120.000.000	APBD	-	3 Kecamatan	120.000.000
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.000.000	APBD	-		1.000.000
33	2.12.04.2.04.013	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Orang	1.000.000	APBD	-	15 Orang	1.000.000
V	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN				58.387.600	APBD	-		58.387.600

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

PROFIL KEPENDUDUKAN										
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat			71.538.000	APBD	-		71.538.000
34	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	71.538.000	APBD	-	100 Buku	71.538.000
JUMLAH						10.545.546.416				10.545.546.416

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD.

Berdasarkan tinjauan terhadap hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat, usulan mengenai program dan kegiatan Pelayanan dokumen Kependudukan dan Pencatan Sipil tidak ditemui. Ini dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam usulan musrenbang adalah berbentuk fisik sarana dan prasarana (infra struktur). Hal ini disebabkan karena masih rendah pemahaman masyarakat terhadap pentingnya arti dokumen kependudukan, padahal dokumen kependudukan merupakan persyaratan utama untuk memperoleh fasilitas yang diberikan pemerintah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Renja Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2021-2026, tujuan dan sasaran Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

*Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel		1. Indeks Kepuasan Masyarakat	88,34 (A)

		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Cepat, Tepat, Transparan dan Akuntabel	2. Persentase OPD Pengguna Pemanfaatan dan Akses Data Kependudukan	100%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas		3. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	75 (BB)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas	4. Nilai AKIP Perangkat Daerah	80,10 (A)

3.3 Program Dan Kegiatan

Dalam menyusun Rancangan rencana kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025 diarahkan untuk lebih mengoptimalkan peningkatan pelayanan publik. Selain itu juga memprioritaskan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat Kabupaten.

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pencapaian target nasional kepemilikan KTP-el;
3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat;
4. Pencapaian SPM.

Untuk Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas terdapat 5 (lima) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dan terakomodir dalam dokumen Rancangan Renja Tahun 2025. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud direncanakan tersebar di seluruh Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun rincian program dan kegiatan pada Rancangan Renja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Rumusan Rencana program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju 2026
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.378.992.866	APBD	-		9.674.146.284
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	8.200.000	APBD	-	100%	16.710.000
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	6.072.139.108	APBD	-	100%	6.076.394.108
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	5.928.479.108	APBD	-	100%	5.928.479.108

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	8.355.000
5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	100%	139.560.000	APBD	-	100%	139.560.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	1.000.000	APBD	-	100%	180.000.000
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinasnya	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	180.000.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dina		100%	887.339.530	APBD	-	100%	975.000.000
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapil KKA	5 Jenis	10.000.000	APBD	-	12 Bulan	10.000.000
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	400.000.000	APBD	-	12 Bulan	500.000.000
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapil KKA	10 Jenis	12.998.922	APBD	-	10 Jenis	30.000.000
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapil KKA	3 Jenis	19.801.000	APBD	-	3 Jenis	40.000.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapil KKA	5 Jenis	29.582.608	APBD	-	5 Jenis	30.000.000
12	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapil KKA	25 Eksemplar	5.000.000	APBD	-	25 Eksemplar	5.000.000
13	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapil KKA	5 Kali	12.375.000	APBD	-	5 Kali	10.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

14	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapil KKA	100 Kali	397.582.000	APBD	-	100 Kali	350.000.000
5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	2.000.000	APBD	-	100%	140.000.000
15	2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil KKA	3 Unit	1.000.000	APBD	-	3 Unit	105.000.000
16	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Disdukcapil KKA	2 Jenis	1.000.000	APBD	-	2 Jenis	35.000.000
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		100%	2.320.504.228	APBD	-		2.182.762.176
17	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	90.704.460	APBD	-	33 Jenis	90.718.200
18	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	170.000.000	APBD	-	100%	180.000.000
19	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	2.059.799.768	APBD	-	100%	1.912.043.976
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah ber kondisi baik		100%	87.810.000	APBD	-	100%	103.280.000
20	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	15.000.000	APBD	-	100%	5.000.000
21	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	12.810.000	APBD	-	100%	38.280.000
22	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	60.000.000	APBD	-	100%	60.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

II	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				557.328.550	APBD	-		840.017.6119
8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	505.809.650	APBD	-		587.497.119
23	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil KKA	2 Dokumen	1.000.000	APBD	-	2 Dokumen	92.204.000
24	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	125.775.400	APBD	-	100%	116.258.869
25	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	188.671.205	APBD	-	1000 Dokumen	197.734.250
26	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	181.300.000	APBD	-	3500 Dokumen	181.300.000
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	50.518.900	APBD	-		100.520.000
27	2.12.02.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	50.518.900	APBD	-	100%	100.520.000
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	1.000.000	APBD	-		152.000.000
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Disdukcapil KKA	120 Orang	1.000.000	APBD	-	120 Orang	152.000.000
III	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				236.000.000	APBD	-		583.128.100

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		100%	236.000.000	APBD	-		583.128.100
29	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	235.000.000	APBD	-	1000 Dokumen	433.128.100
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	150.000.000
IV	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase informasi database kependudukan yang disampaikan			301.687.000	APBD	-		416.337.000
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			300.687.000	APBD	-		300.687.000
31	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	180.687.000	APBD	-	5 OPD	180.687.000
32	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	120.000.000	APBD	-	3 Kecamatan	120.000.000
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	1.000.000	APBD	-		115.650.000
33	2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Orang	1.000.000	APBD	-	15 Orang	115.650.000
V	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase publikasi Profil Kependudukan			58.387.600	APBD			71.538.000
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat			71.538.000	APBD	-		71.538.000
34	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	71.538.000	APBD	-	100 Buku	71.538.000
JUMLAH						9.806.830.921				11.585.166.503

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk Tahun Anggaran 2025, program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebanyak 5 (lima) Program, 14 (empat belas) Kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Adapun Rincian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Analisis Kebutuhan Pendanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Ranwal Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Analisis Kebutuhan Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.378.992.866	APBD	-		9.378.992.866
1	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan		100%	8.200.000	APBD	-	100%	8.200.000
1	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian tahapan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000
2	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase kesesuaian Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan peraturan perundang-undangan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000
2	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu		100%	6.072.139.108	APBD	-	100%	6.072.139.108
3	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	5.928.479.108	APBD	-	100%	5.928.479.108
4	2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu dan konten sesuai ketentuan peraturan	Disdukcapil KKA	100%	4.100.000	APBD	-	100%	4.100.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

5	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disdukcapi KKA	100%	139.560.000	APBD	-	100%	139.560.000
3	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu		100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
6	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pegawai yang diadakan pakaian dinas	Disdukcapi KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
4	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, aktivitas lapangan, dan pelayanan tamu, dan perjalanan dinas		100%	887.339.530	APBD	-	100%	887.339.530
7	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disdukcapi KKA	5 Jenis	10.000.000	APBD	-	12 Bulan	10.000.000
8	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Disdukcapi KKA	5 Jenis	400.000.000	APBD	-	12 Bulan	400.000.000
9	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Disdukcapi KKA	10 Jenis	12.998.922	APBD	-	10 Jenis	12.998.922
10	2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Disdukcapi KKA	3 Jenis	19.801.000	APBD	-	3 Jenis	19.801.000
11	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disdukcapi KKA	5 Jenis	29.582.608	APBD	-	5 Jenis	29.582.608
12	2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disdukcapi KKA	25 Eksemplar	5.000.000	APBD	-	25 Eksemplar	5.000.000
13	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Daerah	Disdukcapi KKA	5 Kali	12.375.000	APBD	-	5 Kali	12.375.000
14	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dihadiri	Disdukcapi KKA	100 Kali	397.582.000	APBD	-	100 Kali	397.582.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

5	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah		100%	2.000.000	APBD	-	100%	2.000.000
15	2.12.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disdukcapil KKA	3 Unit	1.000.000	APBD	-	3 Unit	1.000.000
16	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang diadakan	Disdukcapil KKA	2 Jenis	1.000.000	APBD	-	2 Jenis	1.000.000
6	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya		100%	2.320.504.228	APBD	-		2.320.504.228
17	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diadakan	Disdukcapil KKA	33 Jenis	90.704.460	APBD	-	33 Jenis	90.704.460
18	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terpenuhi	Disdukcapil KKA	100%	170.000.000	APBD	-	100%	170.000.000
19	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pembayaran gaji pegawai tidak tetap tepat waktu	Disdukcapil KKA	100%	2.059.799.768	APBD	-	100%	2.059.799.768
7	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah ber kondisi baik		100%	87.810.000	APBD	-	100%	87.810.000
20	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kendaraan dinas perorangan/ jabatan yang terpelihara dan memiliki izin	Disdukcapil KKA	100%	15.000.000	APBD	-	100%	15.000.000
21	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase peralatan dan mesin dalam kondisi baik	Disdukcapil KKA	100%	12.810.000	APBD	-	100%	12.810.000
22	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor disewa	Disdukcapil KKA	100%	60.000.000	APBD	-	100%	60.000.000
II	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				557.328.550	APBD	-		557.328.550

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

8	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	505.809.650	APBD	-		505.809.650
23	2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Disdukcapil KKA	2 Dokumen	1.000.000	APBD	-	2 Dokumen	1.000.000
24	2.12.02.2.01.04	Peningkatan Dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase petugas pelayanan pendaftaran penduduk yang bersrtifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	125.775.400	APBD	-	100%	125.775.400
25	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen KK, KTP - el dan SPWNI diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	188.671.205	APBD	-	1000 Dokumen	188.671.205
26	2.12.02.2.01.07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Kartu Identitas Anak Yang Diterbitkan	10 Kecamatan	3500 Dokumen	181.300.000	APBD	-	3500 Dokumen	181.300.000
9	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	50.518.900	APBD	-		50.518.900
27	2.12.02.2.01.01	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk yang diadakan	Disdukcapil KKA	100%	50.518.900	APBD	-	100%	50.518.900
10	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		100%	1.000.000	APBD	-		1.000.000
28	2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi	Disdukcapil KKA	120 Orang	1.000.000	APBD	-	120 Orang	1.000.000
III	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				236.000.000	APBD	-		236.000.000
11	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Hak Masyarakat dalam Kepemilikan Dokumen atas Hasil Pencatatan Sipil		100%	236.000.000	APBD	-		236.000.000

**Rancangan Rencana Kerja
DISDUKCAPIL Tahun 2025**

29	2.12.03.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Yang Diterbitkan	Disdukcapil KKA	1000 Dokumen	235.000.000	APBD	-	1000 Dokumen	235.000.000
30	2.12.03.2.01.02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase petugas pelayanan pencatatan sipil yang bersertifikat kompetensi	Disdukcapil KKA	100%	1.000.000	APBD	-	100%	1.000.000
IV	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				301.687.000	APBD	-		301.687.000
12	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				300.687.000	APBD	-		300.687.000
31	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD	Kabupaten Kepulauan Anambas	5 OPD	180.687.000	APBD	-	5 OPD	180.687.000
32	2.12.04.2.03.08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Kecamatan Yang dilakukan pemutakhiran data kependudukan	Kabupaten Kepulauan Anambas	3 Kecamatan	120.000.000	APBD	-	3 Kecamatan	120.000.000
13	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1.000.000	APBD	-		1.000.000
33	2.12.04.2.04.013	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Peserta	Kabupaten Kepulauan Anambas	15 Orang	1.000.000	APBD	-	15 Orang	1.000.000
V	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				58.387.600	APBD	-		58.387.600
14	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat			71.538.000	APBD	-		71.538.000
34	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan Kabupaten Kepulauan Anambas	Disdukcapil KKA	100 Buku	71.538.000	APBD	-	100 Buku	71.538.000
JUMLAH						10.545.546.416				10.545.546.416

Adapun pendanaan Program dan Kegiatan diatas direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

Sebagai Informasi disampaikan bahwa sejak Tahun Anggaran 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan, namun dana DAK Non Fisik dimaksud tidak dianggarkan kembali dalam APBN TA 2024 sehingga alokasi anggaran DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk tidak akan diakomodir pada dokumen usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan TA 2025.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja 2025 ini disusun sebagai pedoman untuk merumuskan program dan kegiatan guna mencapai sasaran dalam rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis yang ada, upaya untuk meningkatkan capaian indikator pembangunan kependudukan dapat disejalankan terhadap rumusan RPJMD periode 2021-2026 serta dalam RKPD 2025. Tentunya apa yang dirumuskan dalam rencana kerja 2025 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, berangkat dari Dokumen Perencanaan Tahun Anggaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan merumuskan tahapan pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dengan memanfaatkan semua potensi yang ada telah ada baik dalam hal sumber dana ataupun dalam hal sumber daya manusia.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2025 ini, Disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Rancangan Renja ini, maka :

1. Rancangan Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasional peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025;
3. Rancangan Renja ini yang kemudian menjadi Rancangan Akhir Renja yang akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2025;

3. Rancangan Renja ini yang kemudian menjadi Rancangan Akhir Renja yang akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Tahun 2025;

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Selanjutnya pada akhir tahun anggaran 2025 akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Tarempa, Maret 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



HERYANA, SE

Pembina Tk. I

NIP. 19741130 200212 2 003